
Evaluasi Dinamika Pengangguran Pasca Mewabahnya Pandemi COVID-19 Di Provinsi Sumatera Utara: Sebuah Kajian Ekonomi

Frandika Situmorang¹, Putri Kemala Dewi Lubis²

^{1,2}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar Ps. V, Kabupaten Deli Serdang, 20221, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 9 Mei 2024

Revisi: 25 Maret 2025

Diterima: 28 Maret 2025

Keywords:

Open Unemployment Rate, COVID-19 Pandemic, Government Policies.

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various sectors of life, including employment. The province of North Sumatra is no exception to this crisis, with unemployment rates experiencing a significant increase especially during the COVID-19 pandemic. This research aims to evaluate the dynamics of unemployment in North Sumatra post-COVID-19 pandemic. The research method used is qualitative literature study with a type of literature review research. Research data were obtained from literature review studies such as novels, notes, and previous study results, as well as data published by the Central Statistics Agency of North Sumatra Province. The analyzed data include the Open Unemployment Rate data in North Sumatra for the last 10 years starting from 2023. The research results show that the COVID-19 pandemic has caused a spike in unemployment in North Sumatra. The unemployment trend shows a significant increase pattern since 2020, with continuous decreases until 2023. The policies implemented by the government to address the impact of the pandemic on unemployment have shown conformity with expectations and have worked as intended.

F. Situmorang dan K. D. L. Putri, "Evaluasi Dinamika Pengangguran Pasca Mewabahnya Pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara: Sebuah Kajian Ekonomi," *Journal Of Economics And Regional Science*, vol. 5, no. 1, 23-37, 2025.

Abstraksi

Pandemi COVID-19 merupakan rebakan wabah yang merugikan bagi seluruh belahan dunia terhadap berbagai sektor kehidupan, diantaranya yakni ketenagakerjaan. Provinsi Sumatera Utara pun tidak terlepas dari situasi sulit ini, dengan tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan yang signifikan terutama saat pandemi COVID-19 hadir. Penelitian ini diurgensikan guna mengevaluasi dinamika pengangguran di Sumatera Utara pasca pandemi COVID-19. Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe riset daftar studi literatur. Data penelitian diperoleh dari studi catatan pustaka berupa laporan berita, catatan, dan hasil studi terdahulu, serta data yang disebarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi

Kata Kunci:

Tingkat Pengangguran Terbuka, Pandemi COVID-19, Kebijakan Pemerintah.

Sumatera Utara. Data yang dianalisis meliputi data Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara selama 10 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan angka pengangguran di Sumatera Utara. Tren pengangguran menunjukkan pola peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020, dengan penurunan terus-menerus hingga tahun 2023. Kebijakan yang direalisasikan oleh yang berwenang seperti pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi terhadap pengangguran telah menunjukkan kesesuaian dengan ekspektasi dan bekerja sebagaimana mestinya.

JEL Classification: J64, I38

Penulis Korespondensi:

Nama Penulis : Frandika Situmorang
Telpon/HP : 085261215558
Email : frandikasitumorang258@gmail.com

PENDAHULUAN

Problematisasi ketenagakerjaan adalah masalah yang masih dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Ini disebabkan oleh peningkatan tingkat pengangguran, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan jumlah angkatan kerja yang terus-menerus bertambah banyak jumlahnya (Handayani & Noviar, 2022). Dalam definisi lain, Tenaga kerja adalah semua individu yang sedang dalam status bekerja atau siap untuk menerima pekerjaan dalam suatu ekonomi pada waktu tertentu (Sukirno, 2002).

Isu ketenagakerjaan merupakan tantangan yang terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia, yang ditandai oleh Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi. Menurut penelitian oleh (Aprilya & Juliprijanto, 2022), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merujuk pada proporsi individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan yang bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena banyaknya angkatan kerja yang mengalami pengangguran, yang pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang berusia di atas 15 tahun, termasuk yang bekerja, memiliki pekerjaan, atau menganggur dalam jangka waktu tertentu.

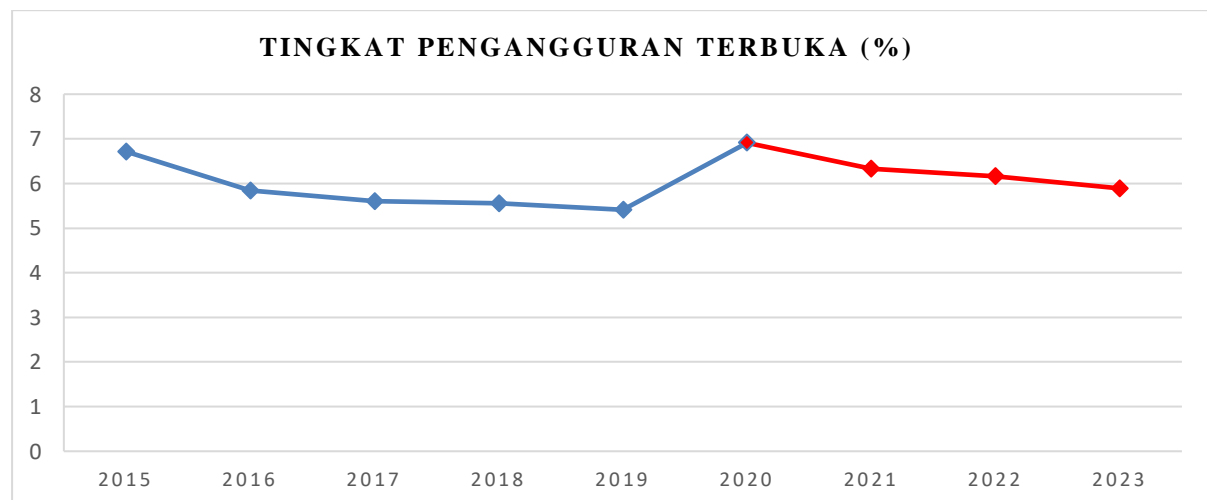
Menurut definisi alternatif lainnya, yang disampaikan oleh (Boediono, 2002), Tingkat Pengangguran Terbuka merujuk pada bagian dari banyaknya angkatan kerja yang bersedia secara terbuka untuk mencari pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan. Lebih lanjut, dikutip dalam buku yang ditulis oleh (Todaro, M.P., 2000), Tingkat Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai individu yang sedang tidak dalam status bekerja namun secara terbuka mencari pekerjaan dan bersedia bekerja dengan imbalan yang pantas.

Tabel 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	TPT (%)
2015	6.71
2016	5.84
2017	5.60
2018	5.56
2019	5.41
2020	6.91
2021	6.33
2022	6.16
2023	5.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dalam data yang dipresentasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, terdapat fluktuasi dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama 10 tahun terakhir, dihitung sejak mulai dari tahun 2013. Namun, puncak persentase terjadi pada tahun 2020, yang juga merupakan tahun dengan tingkat tertinggi dalam 1 dekade terakhir, diduga karena dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia secara luas (Fahri et al., 2020).



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Pandemi COVID-19 dimulai saat lima kasus pertama dilaporkan di kota Wuhan. Dari situlah, jumlah kasus terus meningkat setiap hari di China, mencapai puncaknya antara bulan Januari dan awal bulan Februari 2020. Hingga pada bulan November 2021, tercatat kasus dengan lebih dari 255.000.000 korban dengan kasus positif dan telah tercatat, dengan sejumlah lebih dari angka 5.120.000 kematian. Negara Italia mencatat kasus awal terbanyak, dengan 86.498 kasus, disusul dengan Negara Amerika Serikat tercatat sebanyak 85.228 kasus, dan Negara China dengan laporan sebanyak 82.230 terjadinya kasus dalam (Efriza, 2021).

Virus Corona, atau yang familiar ditelinga sebagai COVID-19, diproyeksikan sebagai penyakit yang mudah menular dan diduga disebabkan oleh varian baru dari virus corona yang ditemukan tidak lama ini. Sebelum wabah ini tercatat kasus di kota Wuhan, di Tiongkok, pada akhir tahun 2019 yakni Bulan Desember lalu, penyakit ini tidak diketahui sebelumnya. Di negara Indonesia sendiri, Bapak Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan kasus catatan pertama korban terjangkit Covid-19 pada 2 Maret 2020, di Istana Negara. kemudian Pada 11 Maret 2020, tercatat kematian pertama akibat COVID-19 di kalangan warga negara Indonesia. Pada minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan telah pulih, dan dipersilahkan untuk selebihnya melakukan perawatan mandiri pada 13 Maret 2020. Ini merupakan kesembuhan yang pertama dari korban COVID-19 di Indonesia (Jalil, A., & Kasnelly, 2020).

Pada saat itu, pemerintah mengambil tindakan dalam menangani pandemi dengan menerapkan Pembatasan PSBB merujuk pada pembatasan aktivitas tertentu penduduk di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi dengan cara yang dapat mencegah penularan yang semakin merebak dan meluas. Dalam pengertian alternatif lain, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu salah satu langkah yang ditekankan oleh pemerintah. Meskipun realisasi dari kebijakan ini bermanfaat dan berjalan sesuai ekspektas dalam memperlambat laju penyebaran virus COVID-19, namun pembatasan pada mobilitas penduduk serta penutupan segala pusat perbelanjaan ternyata dapat menyebabkan gangguan-gangguan pada siklus

aktivitas ekonomi yang sebelumnya dalam keadaan lancar menjadi terhambat (Adinda Putri et al., 2021).

Pusat perbelanjaan terpaksa ditutup sementara, berbagai kios di dalamnya secara tidak langsung merasakan penurunan pemasukan. Banyak kios kecil yang bahkan tidak mampu bertahan dan terpaksa tutup karena peraturan tersebut. Perusahaan besar seperti mal, minimarket, dan toko besar lainnya juga mengalami penurunan pendapatan, yang mengakibatkan pengambilan keputusan sulit seperti pemutusan hubungan kerja dengan para pegawai untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan. Hal ini berdampak pada perekonomian secara keseluruhan pada saat itu. Menurut (N. Gregory Mankiw, 2020) Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka berdampak negatif secara signifikan pada peningkatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno, 2015) adalah siklus dan fluktuasi kegiatan ekonomi meningkat, menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam definisi alternatif, pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat efektivitas atau jumlah peluang kerja yang tersedia di suatu daerah untuk masyarakatnya. Jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat, menandakan aktivitas ekonomi di daerah terkait aktif berdampak atas terdapat banyak kesempatan kerja yang terbuka dan permintaan tenaga kerja akan terus mengalami kenaikan. Hal ini berdampak baik pada kesempatan kerja. Namun, jika fluktuasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurun, kuantitas lapangan kerja akan mengalami penurunan disebabkan oleh tingkat produktivitas ekonomi yang rendah dan permintaan akan tenaga kerja juga mengalami penurunan (Hafiza et al., 2018 dalam Handayani & Noviar, 2022).

Berdasar pada uraian latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk mendalami riset dan memutuskan dengan judul "Evaluasi Dinamika Pengangguran Pasca Terjadinya Pandemi COVID-19 Di Provinsi Sumatera Utara dengan urgensi penelitian: Kebijakan apa saja yang direalisasikan pemerintah dalam menangani dan menuntaskan masalah pandemi sehingga dapat menekan angka pengangguran pasca COVID-19 dan bagaimana dinamika tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara pasca COVID-19 yang melanda saat itu.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif serta jenis riset yang diaplikasikan adalah Studi Literatur. Studi literatur, atau library research, adalah jenis studi yang menggunakan sumber literatur seperti buku, catatan, dan data hasil penelitian sebelumnya. Berlawanan dengan pendekatan metode ini adalah narasi dan analisis. Kemudian, penelitian ini melibatkan metode dengan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan atas data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Fokus penelitian adalah pada tingkat pengangguran yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada rentang 10 tahun terakhir, untuk memahami dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka setelah pandemi COVID-19 (Siti Nurhalisa et al., 2023).

HASIL

Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Pengangguran Saat Dan Pasca Pandemi COVID-19

Menurut publikasi (Disnakertrans Kabupaten Berau, 2019) bahwa wabah COVID-19 berhasil menyebabkan peningkatan pengangguran yang cukup besar di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah mengimplementasikan tiga langkah yang diharapkan strategis sebagai berikut:

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI tetap mengimplementasikan pelatihan berdasar pada kompetensi dan produktivitas yang langsung berhubungan dengan program pemerintah yakni BLK Tanggap COVID-19. Untuk realisasinya, peserta kegiatan tidak hanya diberikan bekal keahlian, mereka kemudian diberikan insentif setelah pelatihan. Menaker RI, Ibu Ida menjelaskan adanya beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) akan dialihfungsikan untuk tempat dapur umum juga pusat produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19 seperti hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), tempat pencuci tangan portabel masker, juga olahan makanan berupa produk jadi. "Semua yang merupakan output dari

BLK kemudian disebarluaskan dengan Cuma-cuma kepada korban yang dirugikan oleh penyebaran virus," ungkapnya.

2. Rencana pengembangan dan memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja yang mendapatkan kerugian atas pandemi meliputi program padat karya dan kewirausahaan.
3. Kementerian Ketenagakerjaan RI membuka pelayanan konsultasi dan pengaduan atas dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja/buruh di suatu korporasi. Lembaga negara menganggap solusi strategis tersebut sejalan atas enam pilar yang kemudian diterapkan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Pilar-pilar tersebut meliputi:
 - a) Memberikan stimulan kepada ekonomi untuk para penggiat usaha agar mampu melewati rintangan selama pandemi dan tetap menggunakan jasa pekerja/buruh.
 - b) Memberikan keringanan berupa pengurangan pajak atas pendapatan dan credit interest bagi pekerja yang berkecimpung di sektor formal.
 - c) Melaksanakan penyebaran bantuan sosial untuk tenaga kerja yang berkecimpung di sektor formal juga di sektor informal.
 - d) Memberikan prioritas pada kebijakan Kartu Prakerja kepada karyawan yang terdampak PHK maupun terpaksa dirumahkan dalam sisten SISNAKER.
 - e) Memperluas program khusus padat karya dan sektor niaga untuk menyerap sumber daya manusia.
 - f) Memberikan proteksi kepada pelaku jasa migran baik di penempatan luar negara maupun sesudah balik ke dalam negeri.

Di Provinsi Sumatera Utara, Gubernur telah mengeluarkan surat edaran untuk pencegahan penularan Covid-19. Tujuan fundamental penyebaran surat itu adalah agar 6 kabupaten/kota besar di provinsi tersebut menerapkan kebijakan berupa PPKM Mikro diantaranya Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Simalungun untuk diterapkan selama periode tertentu.

Pemaparan oleh (Pemprov Sumut, 2021) aturan main dari PPKM Mikro adalah melakukan mobilitas atas kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala kebutuhan. Berbeda dengan PPKM sebelumnya, PPKM Mikro mengacu pada zonasi wilayah, dengan mengevaluasi kembali terkait pengontrolan hingga ke zona paling rendah yakni tingkat RT.

Keasingan lainnya terletak pada pelanggaran aktivitas perkantoran. Dalam PPKM sebelumnya, bekerja di kantor hanya diperbolehkan hingga 25% kapasitas kantor (Work From Office), namun dalam PPKM Mikro, regulasi yang diterapkan tersebut dilonggarkan menjadi 50% pekerja kantoran, dengan pengurangan kerja dari rumah (Work From Home) dapat diturunkan pada angka 50% juga. Kegiatan pendidikan juga dilakukan secara dalam jaringan dan dilakukan pembatasan kegiatan di sektor pendidikan. Selain itu, setiap desa yang ada maupun setiap kelurahan diwajibkan untuk menciptakan posko-posko yang nantinya melibatkan banyak macam kalangan masyarakat.

Menurut (Tua et al., 2021) Adapun kebijakan yang terus dilakukan Pemprov Sumut saat Pandemi Covid-19 hingga pasca pandemi untuk menekan angka pengangguran yaitu :

1. Dinas Ketenagakerjaan regional daerah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan sektor swasta agar menyelenggarakan kursus bagi masyarakat yang sedang berjuang mencari lowongan kerja maupun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, diantaranya pelatihan berbasis MTU (Mobile Training Unit) dengan sub pelatihan dalam fokus Kejuruan Tata Rias. Program ini didanai melalui Dana APBD untuk memungkinkan peserta menjadi mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dengan dukungan khusus dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.
2. Perusahaan atau UMKM perlu memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh dana bantuan atau stimulus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan perpanjangan tangan kepada Dinas Ketenagakerjaan Regional Provinsi Sumatera Utara.

3. Dinas Ketenagakerjaan Regional Provinsi Sumatera Utara merajut kebijakan dengan memfasilitasi kursus kepada karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu dengan cara mendaftar di kantornya. Setelah pelatihan, membantu dalam pencarian kerja atau mengkoordinasikan dengan perusahaan swasta atau kepunyaan pemerintah untuk pembukaan lowongan pekerjaan bagi mantan pekerja yang terdampak PHK.
4. Program Prakerja dijalankan di mana masyarakat yang sudah mendaftarkan diri dan masuk kedalam kriteria penerima akan mendapatkan bantuan dari program tersebut. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa tidak ada hambatan atau kendala selama proses pendaftaran hingga tahap pencairan dana dari Program Kartu Prakerja.

PEMBAHASAN

Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Pasca Maraknya Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 terus merebak ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, Kejadian mula-mula pada awal bulan maret 2020 dan tercatat banyak kasus pada saat itu. Korban meninggal akibat pandemi ini pun tercatat tidak sedikit, dan Indonesia menduduki posisi tiga teratas dalam kuantitas korban kematian terbanyak karena wabah COVID-19 di sejajaran negara-negara di Asia (Worldometer, 2020 dalam Siti Nurhalisa et al., 2023). Adapun respons terhadap bencana yang terjadi, pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi mobilitas masyarakat untuk sementara dan dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat penyebaran cukup besar. Langkah tersebut bertujuan agar mengendalikan penyebaran yang lebih luas dari virus tersebut (Siti Nurhalisa et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jika berfokus pada kasus di bulan Agustus 2020, perkembangan perekonomian Indonesia pada bagian kuartal kedua tahun 2020 mengalami penurunan terbilang kurang dari angka 5,32%. Sementara itu, Menkeu ibu Sri Mulyani Indrawati saat dalam rapat pers APBN Kita yang diadakan dengan cara jarak jauh atau virtual menyatakan bahwa perkembangan perekonomian Indonesia

pada bagian kuartal ketiga tahun 2020 diproyeksikan kemudian berkisar antara penurunan sebesar kurang dari angka 2,9% hingga penurunan sebesar kurang dari angka 1,1%.” (Fauzia, 2020 dalam Siti Nurhalisa et al., 2023).

Oleh karena itu, penurunan kemampuan perekonomian juga berdampak pada tingkat pengangguran di Indonesia, yang meningkat karena adanya pemangkasan tenaga kerja. Selain itu, di beberapa sektor, melemahnya perekonomian Indonesia telah menyebabkan beberapa pengusaha kehilangan arus kas, yang akhirnya mengakibatkan perusahaan secara reflek melakukan tindakan berupa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sebagian karyawan ataupun pegawainya. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kuantitas lowongan pekerjaan mengalami penurunan sebesar 62% dihitung sejak bulan Mei 2020 dilakukan perbandingan pada saat bulan Februari 2020.

Publikasi oleh (Pemprov Sumut, 2022), pada saat merebaknya pandemi COVID-19, pihak yang berwenang mengatasinya dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara sukses mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur dan masyarakat miskin. Hal ini dicapai dengan realisasi program kerja yang pada saat itu ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Agustus 2021, persentase pengangguran di Sumut berada pada angka 6,33%, yang merupakan penurunan jika dilakukan perbandingan dengan tahun 2020 yang mencapai angka 6,93%. Sementara itu, dalam hal kemiskinan, Sumut menduduki peringkat pertama dan paling atas dalam rangka menekan angka kemiskinan di Indonesia menurut hasil evaluasi Litbang Kemendagri. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Sumut sebesar 9,14%, yang kemudian turun menjadi 8,49% pada tahun 2021.

Menurut publikasi (Pemprov Sumut, 2023), banyaknya penganggur yang ada di Provinsi Sumatera Utara menurun diiringi dengan pulihnya perekonomian setelah pandemi Covid-19. Menurut publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, banyaknya masyarakat yang menganggur pada bulan Februari 2021 mencapai angka 449.000 jiwa, kemudian mengalami penurunan sebesar 423.000 jiwa pada bulan

Februari 2022, dan terus-menerus secara signifikan mengalami penurunan menjadi sebesar 413.000 jiwa pada bulan Februari 2023.

Pejabat pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumut, yaitu Bapak Edy Rahmayadi, dengan perpanjangan tangan melalui Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut, Bapak Ilyas Sitorus, menjelaskan bahwa program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di masa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi bersama Wagub Sumut Musa Rajekshah adalah untuk menekan jumlah masyarakat yang menganggur. Ilyas Sitorus juga menyatakan bahwa semakin baiknya perekonomian dan regulasi yang diterapkan pemerintah daerah pascapandemi Covid-19 turut berperan dalam penurunan jumlah pengangguran di Sumut.

Iklim investasi yang membaik merupakan salah satu dalang yang berperan sangat vital dalam penurunan banyaknya masyarakat yang menganggur di provinsi ini, melalui adanya pendirian sejumlah wirausaha yang direalisasikan melalui program pemekaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya adalah hadirnya platform berbasis digital yang digunakan untuk sarana penginformasian pasar kerja.

Pemerintah Provinsi Sumut selepas itu mengeluarkan kebijakan melalui program magang yang nantinya direalisasikan untuk luar negeri maupun yang ada di dalam negeri melalui Dinas Tenaga Kerja. Program magang ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan memberikan pengalaman kerja serta meningkatkan kompetensi atau keterampilan calon tenaga kerja. Selain itu, dilaksanakan juga Job Fair yang menghadirkan 35 korporasi sebagai upaya lain dalam mengatasi masalah pengangguran (Pemprov Sumut, 2023).

Dari data Publikasi (Badan Pusat Statistik, 2023) Jika diamati lebih mendalam, angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Ini adalah hasil dari kerja keras Pemerintah Provinsi dalam menangani permasalahan pengangguran yang meningkat saat pandemi Covid-19. Hingga akhir 2023, pemerintah terus berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara.

(CNN Indonesia, 2023) Presiden Joko Widodo telah resmi melakukan penetapan atas status Pandemi COVID-19 ke dalam status endemi. Pandemi jika

didefenisikan yakni mewabahnya suatu penyakit pada masa tertentu secara bersamaan dengan cakupan secara geografis yang sangat luas. Organisasi dalam naungan PBB di bidang kesehatan (WHO) pada bulan Maret 2020 dengan resmi melalui pertimbangan yang cukup matang untuk menetapkan wabah penyakit ini dengan status pandemi. Tiga tahun berlalu, akhirnya Organisasi dalam naungan PBB di bidang kesehatan (WHO) secara resmi telah mengubah fase kedaduratan kesehatan publik yang menjadi suatu inti perhatian nasional (PHEIC).

Presiden telah menyatakan pada beberapa waktu lalu bahwa Indonesia melalui pemerintah telah mampu untuk memasuki fase endemi, akan tetapi keputusan tersebut belum secara resmi disebarluaskan. Meluasnya vaksinasi hingga ke sebagian besar wilayah di Indonesia serta tercatatnya kasus harian yang menurun secara signifikan yang menjadi faktor pertimbangan pemerintah untuk menetapkan fase ini. Dalam hal penyesuaian fase tersebut ditandai dengan dibubarkannya Satgas COVID-19 yang dahulu dibentuk sebagai satuan untuk menangani kasus pandemi di Indonesia. Kemudian vaksin yang nantinya akan diberikan dengan anggapan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular biasa. Dalam pernyataan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat, tantangan terberat selama menjabat sejak tahun 2014 yakni menghadapi krisis dalam berbagai aspek selama pandemi COVID-19

Hal ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus menerapkan kebijakan untuk menekan angka pengangguran, mengingat status pandemi telah berubah menjadi endemi yang berarti pembatasan kegiatan perekonomian sudah dilonggarkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terkonfirmasi bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada saat Pandemi COVID-19 dalam menangani kasus pengangguran di Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan kesesuaian dengan ekspektasi terhitung sampai akhir tahun 2023. Ini terbukti dengan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka pengangguran di wilayah tersebut yang terus mengalami penurunan dan diimbangi dengan membaiknya keadaan perekonomian.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan dan metodologinya. Oleh karena itu, perlu untuk melanjutkan penelitian ini agar lebihb dalam dan komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut secara menyeluruh. Selain itu, penelitian lanjutan juga menambahkan faktor-faktor lain yang turut diperhatikan sebagai hal yang dapat memengaruhi dinamika tren pengangguran di Sumatera Utara, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur industri, dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Sumatera Utara, khususnya dalam konteks pasca pandemi COVID-19.

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik yang sama dalam penelitian ini, lakukanlah analisis perbandingan antara Provinsi Sumatera Utara dengan provinsi lainnya atau negara lain yang memiliki karakteristik serupa dalam hal dampak Covid-19 terhadap pengangguran, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, lalu lakukanlah studi tentang inisiatif atau program-program yang telah berhasil atau gagal dalam mengatasi pengangguran pasca-Covid di tempat lain, dan menganalisis potensi penerapannya di Provinsi Sumatera Utara serta memperluas cakupan penelitian untuk melibatkan aspek-aspek lain yang terkait dengan pengangguran, seperti dampaknya terhadap kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kebijakan dan program-program pelatihan keterampilan, memberikan insentif kepada industri untuk menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat sistem jaringan sosial untuk mendukung mereka yang terdampak pengangguran. Pemerintah juga perlu fokus pada pemulihan ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja dan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilya, I., & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Umr, Dan Tpt Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 469–482. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.238>

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara*.
- Boediono. (2002). *Ekonomi Makro*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- CNN Indonesia. (2023). *Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19: Kita Masuk ke Endemi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621150757-20-964807/jokowi-cabut-status-pandemi-covid-19-kita-masuk-ke-endemi>
- Covid-, P. (2021). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 3(June), 71–86.
- Covid-, P., Nurhalisa, S., Syafitri, A., Al-faridzi, S., & Wulandari, S. (2023). *Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia*. 4(5), 1322–1329.
- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau. (2019). *LANGKAH STRATEGIS MENAKER IDA ATASI PENGANGGURAN DI MASA COVID 19*. Disnakertrans.Beraukab.Go.Id. <https://disnakertrans.beraukab.go.id/12-berita/131-langkah-strategis-menaker-ida-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19.html>
- Efriza, E. (2021). COVID-19. *Baiturrahmah Medical Journal*, 1(1), 60–68.
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/142>
- Handayani, F., & Noviar, H. (2022). *ANALISIS TREND PENGANGGURAN PASCA COVID-19*. XVIII(2), 8–16.
- Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). *Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid19)*. 16.
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 720–729. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>
- M Todaro. (2000). *Economic Development* (8th ed.). Addison-Wesley Longman.
- N. Gregory Mankiw. (2022). *Principles of Economics*. Cengage Learning.

Pemprov Sumut. (2021). *Tekan Penyebaran Covid-19, Sumut Terapkan PPKM*. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/tekan-penyebaran-covid19--sumut-terapkan-ppkm-mikro>

Pemprov Sumut. (2022). *Di Tengah Pandemi Covid-19 Pemprov Sumut Berhasil Tekan Angka Pengangguran Dan Kemiskinan*. <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/di-tengah-pandemi-covid19--pemprov-sumut-berhasil-tekan--angka-pengangguran-dan-kemiskinan>

Pemprov Sumut. (2023). *Tren Pengangguran Di Sumut Dampak Pulihnya Ekonomi*. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sukirno, S. (2002). *Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi*. PT Rajagrafindo Persada.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada.

Tua, D., Raja, M., & Laowo, Y. (2021). *PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA DAMPAK COVID-19 Oleh : Universitas Darma Agung Medan This research is based on the basis that the number of unemployed in North Sumatra Province has increased from year to year which is caused by urbanization and th.* 133-149.